

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Adjie, Habib. (2007). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Gea, Antonius Atoshoki, dkk. (2002). *Relasi dengan Sesama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hartono, Sunaryati. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, cet ke-2*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johny. (2005). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, Maria Farida S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Bandung: Kanisius.
- Kansil, C.S.T. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasir, Muhammad. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Notodisoerjo, R. Sugondo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Pitlo. A. (1978). *Pembuktian dan Daluarsa*. (M.Isa Arief, penerjemah). Jakarta: PT Intermasa.
- Sembiring, M.U. (1997). *Teknik Pembuatan Akta*. Medan: Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. (1993). *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo. (1972). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Cet ke-5*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerodjo, Irawan. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.

- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Pembuktian*, Cet. ke-8. Jakarta: Pramadya Paramita.
- Sudarto. (1987). *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sujamto. (1987). *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. (1983). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (1997). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Tan Thong Kie, (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ten Berge, J.B.J.M. (1996). *Besturen Door de Overheid*. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Tobing, G.H.S Lumban. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

II. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Ikatan Notaris Indonesia (INI). (2005). *Kode Etik Notaris*.
- Indonesia. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 10 Tahun 2004. LN No 53 tahun 2004. TLN No. 4389.
- Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 tahun 2004. TLN No. 4332.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

III. Lain-Lainnya

- Anwary, S. "Penegakkan Negara Hukum di Republik Indonesia". <http://www.iseps-amra.or.id/penegakan%20supremasi%20hukum%20di%20RI.doc>. Diunduh 5 Juni 2010.

- Tanuredjo, Budiman. “*Trias Politica* di Zaman yang Berubah”. http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=202&coid=3&caid=3. Diunduh 5 Juni 2010.
- Hadjon, Philipus M. “Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU. No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari – Februari 1996.
- Kode Etik Notaris*, Diktat Kuliah Kode Etik Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2009.
- Kamus Bahasa Indonesia II*. (1983). Jakarta: Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Machsun, Miftachul. ”Majelis Pengawas Suatu Instrumen Untuk Mempertahankan Kehormatan dan Martabat Notaris”. Makalah disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 30 Juli 2009.
- “Mekanisme *Impeachment* & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”. <http://id.wikisource.org>. Diunduh 6 Juni 2010.
- “Negara Hukum”. <http://prince-mieniu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>. Diunduh 6 Juni 2010.
- Susanto, Riki. “Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Menjalankan Tanggung Jawab Pembuatan Akta-Akta Notaris”. <http://rikisusantotan.blogspot.com/2009/12/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam.html>. Diunduh 4 Juni 2010.
- “Notaris”, <http://wapedia.mobi/id/Notaris#1>. Diunduh 5 Juni 2010.
- “Sejarah Perkumpulan Notaris Indonesia”, <http://www.ikatannotarisindonesia.or.id>. Diunduh 4 Juni 2010.
- Sinaga, NPD. Budiman. “Pertumbuhan dan Perkembangan Negara Hukum”. <http://bnpds.wordpress.com/2008/06/28/negara-hukum/>. Diunduh 6 Juni 2010.
- Soerjadi, Trimoejla D. “Beberapa Permasalahan Tentang Akta Notaris/PPAT”. Temu Ilmiah dan Pembinaan serta Pembekalan Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Garden Palace Hotel, Surabaya, 14 Juni 2003.